

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Gustav. (1950). *Legal Philosophy. Translated by Kurt Wilk*. Oxford University Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Kurniawan, A. (2018). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muchsin. (2001). *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia*. UMS Press.
- Mustofa, A. (2013). *Uji Hipotesis Statistik*. Gapura Publishing.
- Rohman, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu.
- Saragih, H. (2017). *Regulasi Pemerintahan Daerah*. Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, M. (2019). *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia.
- Sofia, A. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bursa Ilmu.
- Sumarno, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Alfabeta.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (N. Kelik). Lekkas.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber lain

Fahrudin, M. (2023). *Peranan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna) dalam Meningkatkan Kepedulian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Andir (Studi Kasus pada Kelurahan Andir Baleendah)* [Skripsi]. Universitas Pasundan.

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 35.

Hulu, S. Y. P. (2025). *Apa Bedanya Perda Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota?* Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-bedanya-perda-kabupatenkota-dengan-peraturan-bupatiwalikota>

Ishaq. (2014). Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 81–100.

Kusmiati, N. I. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Litigasi*, 17(1), 3256–3283.

Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 162–179.

Suratman. (2006). *Partisipasi Masyarakat Pesisir Dan Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 38 Purworejo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syaiful. (2024, September 12). *Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi, dan Proses Pembentukannya*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/12/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-dan-proses-pembentukannya/>

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Pengembangan Kepemudaan*. Jakarta: Kemenpora RI.

Nurjaman, M. (2017). Pelayanan Kepemudaan dalam Perspektif Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 123-135.